

STUDI PENENTUAN DESA-DESA PUSAT PERTUMBUHAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

oleh
Luthfi Muta'ali

Staf Pengajar Jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah, Fakultas Geografi,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

INTISARI

Salah satu strategi pembangunan perdesaan yang menjadi fokus penelitian ini adalah penentuan desa pusat pertumbuhan. Penelitian bertujuan untuk: (1) mengkaji konsepsi desa pusat pertumbuhan, (2) identifikasi kriteria penentu desa pusat pertumbuhan, (3) penetapan desa pusat pertumbuhan, dan (4) penentuan strategi pengembangan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, bersifat kuantitatif dan berbasis pada analisis data sekunder. Lingkup daerah penelitian meliputi seluruh desa di empat Kabupaten Propinsi DIY, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik pembobotan, analisis Guttman, Skalogram dan indeks sentralitas, analisis Location Quotient (LQ), serta analisis statistik korelasi tata jenjang Spearmann.

Desa pusat pertumbuhan adalah desa yang memiliki karakteristik aksesibilitas lokasi strategis, hirarki pelayanan tinggi, dan sektor basis pengembangan bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan, desa-desa di Propinsi DIY memiliki aksesibilitas lokasi cukup baik, sistem spasial hirarki pelayanan menunjukkan gejala primasi dan kesenjangan. Basis kegiatan ekonomi terletak pada sektor pertanian, dengan dukungan sektor jasa, perdagangan, dan industri. Sebagian besar desa pusat pertumbuhan terpilih merupakan ibu kota kecamatan, bahkan ada yang sekaligus ibukota Kabupaten. Untuk menghindari konsentrasi titik pertumbuhan pada satu tempat, dihasilkan pula alternatif desa pusat pertumbuhan. Desa-desa pusat pertumbuhan terpilih dapat digunakan untuk menetapkan desa pusat pertumbuhan di masing-masing kecamatan, khususnya dalam konteks program Pengembangan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan. Penelitian merekomendasikan tentang perlunya redistribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah, terutama desa-desa yang berhirarki pelayanan rendah, aksesibilitas lokasi rendah dan kurang didukung orientasi sektor basis pengembangan yang bervariasi. Selain itu perlu pembentukan tata ruang perwilayahan dengan mempunyai hirarki yang sistematis dan fungsional, dari hirarki tertinggi sampai terendah dengan menciptakan keterkaitan fisik maupun sosial ekonomi serta dukungan basis kegiatan ekonomi yang kuat dengan wilayah lain (rural urban linkages).

Kata kunci : Pembangunan perdesaan, desa pusat pertumbuhan, aksesibilitas, hirarki pelayanan, sektor basis pengembangan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Dalam usaha menganalisis dan merencanakan pembangunan serta pertumbuhan wilayah khususnya di perdesaan, para perencana wilayah menghadapi masalah-masalah ketimpangan, khususnya struktur produksi dan infrastruktur. Ketimpangan ini dapat diidentifikasi sebagai wilayah terbelakang atau miskin, wilayah tidak berkembang, ataupun wilayah terlalu maju. Dari segi produksi wilayah, ketimpangan tersebut dapat pula dibedakan atas ketimpangan pendapatan, kesempatan kerja, fasilitas pelayanan kebutuhan dasar, dan lain sebagainya.

Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta issue mengenai kesenjangan wilayah ini terutama adanya kesenjangan antara wilayah yang terletak di perbukitan (sebagian Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul) dengan daerah dataran rendah, khususnya daerah poros Gunung Merapi hingga Pantai Selatan yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kotamadya Yogyakarta. Issue-issue kesenjangan wilayah ini tidak hanya terjadi dalam lingkup satu propinsi saja, tetapi di lingkup wilayah yang lebih luaspun terjadi, demikian pula di lingkup yang lebih kecil lagi misalnya dalam lingkup Kabupaten dan Kecamatan (Anonim, 1992).

Banyak penyebab dari munculnya kesenjangan wilayah ini, diantaranya karena pilihan strategi pembangunan melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi (Sumitro, 1994). Hal ini dibenarkan oleh Kuznets (1971) yang telah menganalisa pola sejarah pertumbuhan negara-negara maju menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk sedangkan untuk tahap selanjutnya mengalami perbaikan (Todaro, 1997).

Permasalahan lain yang berkembang bersamaan dengan adanya issue mengenai kesenjangan atau ketimpangan wilayah adalah munculnya desa-desa tertinggal, yaitu desa-desa yang perkembangannya masih sangat rendah dibandingkan desa-desa lainnya. Pemerintah pada saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk pengentasan desa-desa tertinggal ini (Mubyarto, 1991).

Pelbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan perdesaan yang marak akhir-akhir ini seperti program pembangunan desa terpadu, program Inpres Desa tertinggal (IDT), pola usaha kemitraan, pemberdayaan perdesaan, dan lain-lain cenderung bersifat sektoral dan *top-down* serta belum berbingkai spasial (ruang), sehingga terkesan mengabaikan perbedaan variasi potensi dan kendala wilayah (Muta'ali, 2000). Dari sisi perencanaan tata ruang, salah satu upaya yang dapat digunakan untuk pengentasan desa-desa tertinggal tersebut adalah membuat suatu sistem penataan ruang yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan desa-desa tertinggal tersebut agar dapat berkembang seperti desa-desa lainnya yang lebih maju (Hanafiah, 1987). Dengan demikian diharapkan issue-issue mengenai ketimpangan wilayah akan dapat teratasi.

Salah satu alternatif upaya penataan ruang adalah dengan menetapkan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan untuk desa-desa

disekitarnya (Taylor, 1981). Tentu saja banyak kriteria yang harus dipenuhi suatu desa untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Oleh karena itu dirasa perlu adanya suatu penelitian mengenai identifikasi desa pusat pertumbuhan agar dapat membentuk suatu sistem perwilayahan yang akan menunjang program pengentasan kemiskinan dan pemerataan pertumbuhan wilayah.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Penelitian ini bermaksud mengkaji sistem tatanan keruangan yang dapat mendorong pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan wilayah perdesaan melalui pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan. Secara operasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menerapkan teori pusat pertumbuhan (*growth centers*) pada tingkat mikro, yaitu konsepsi tentang penentuan desa pusat pertumbuhan.
2. Identifikasi kriteria faktor-faktor penentu Desa Pusat Pertumbuhan.
3. Penetapan Desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Menentukan strategi kebijaksanaan pembangunan perdesaan yang bertumpu pada pengembangan desa pusat pertumbuhan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan dapat menambah perbendaharaan metode atau model pembangunan wilayah perdesaan, khususnya bagi studi pengembangan perdesaan yang berdimensi spasial, serta sebagai bahan masukan bagi pengembangan terminologi pembangunan dari bawah (*development from below*).
2. Bagi penentu kebijakan, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penetapan kebijaksanaan dalam merencanakan wilayah perdesaan, khususnya menyongsong program Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, yang telah dicanangkan Gubernur DIY sejak akhir tahun 2000.

Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Pengertian Desa

Dari segi hukum atau administrasi, desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatannya dengan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Anonim, 1979).

Ditinjau dari segi geografis, desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang terdapat dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Menurut Bintarto (1984) desa terbentuk sebagai hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu ujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi dan juga berhubungan dengan daerah-daerah lain. Lebih lanjut dikatakan, unsur desa terdiri dari daerah, penduduk, dan tata kehidupan.

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Anonim, 1977), desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut: perbandingan manusia dengan lahan yang besar, lapangan kerja agraris, hubungan penduduk akrab, dan masih bersifat tradisional. Lebih lanjut jenis desa ada tiga yaitu desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, terdapat desa IDT (Inpres Desa Tertinggal) dan desa Non IDT, bahkan BPS juga membagi desa menjadi desa-rural dan desa urban.

Departemen Pekerjaan Umum, Cipta Karya (Jayadinata, 1997), pada tahun 1990 memelopori rumusan desa pusat pertumbuhan yaitu desa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa di sekitarnya. Selain itu desa pusat pertumbuhan juga ditetapkan tiga jenis desa lainnya, yaitu desa kota, yaitu desa yang terletak disekitar kota dan mendukung kota secara potensial, desa kritis, yaitu desa yang masih kurang tingkat ekonominya, prasarannya dan potensinya, dan desa nelayan, yaitu desa yang mempunyai potensi perikanan laut dan pusat pertumbuhan nelayan. Ide penetapan desa pusat pertumbuhan tidak terlepas dari konsep dasar atau *grand theory* tentang pusat / kutub pertumbuhan, yang dijelaskan dibagian berikut.

Strategi Kutub dan Pusat Pertumbuhan

Pada prinsipnya, konsep pusat pertumbuhan dilandasi oleh Konsep ruang ekonomi 'Economic Space' yang dikemukakan oleh Francois Perroux pada tahun 1950. Menurut Perroux, pertumbuhan akan terjadi pada kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berbeda-beda dan perkembangan yang terjadi akan menyebar sepanjang saluran-saluran yang beraneka ragam dengan efek yang beragam pula terhadap keseluruhan perekonomian (Misra, 1975).

Menurut Myrdall, 1957 (dalam Muta'ali, 1997), pertumbuhan ekonomi (baca : pembangunan) dalam suatu wilayah tertentu bergantung pada lokasi dari berbagai sumberdaya alam dan berbagai keuntungan lokasi lainnya. Pertumbuhan ini selanjutnya akan menyebar pada daerah belakangnya melalui efek kumulatif yaitu efek sebar (*spread effect*) dan efek serap (*backwash effect*). Prinsip pertumbuhan ekonomi wilayah ditentukan oleh adanya industri propulsif tertentu, cenderung hanya akan menarik modal dari daerah sekitarnya, karena keuntungan lokasi pada wilayah tersebut. Hal ini memungkinkan *backwash effect* akan menjadi lebih kuat dari *spread effect* yang ditandai dengan adanya penyerapan ekonomi wilayah sekitarnya ke pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut. Apabila tidak ada kebijaksanaan intervensi dari suatu mekanisme pasar

maka pertumbuhan ekonomi ini akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang timpang (*regional inequality*). Hal senada dikemukakan oleh Hirschman (1958) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangnya melalui efek popularisasi atau (*polarization effect*) dan efek peneteskan ke bawah (*trickling down effect*). Polarization effect tersebut diperkuat dengan adanya pemusatan investasi pada pusat pertumbuhan, sedangkan *trickling down effect* dapat tumbuh dengan cara meningkatkan daya tarik wilayah sekitarnya. Perbedaan antara konsep Myrdal dan Hirschman adalah terletak pada keyakinan masing-masing akan terjadinya '*spread effect*' atau *trickling down effect*' dengan adanya kutub pertumbuhan tersebut. Menurut Myrdal, *backwash effect*' akan muncul lebih kuat daripada '*spread effect*', sedangkan menurut Hirschman, *trickling down effect* akan lebih kuat daripada *polarization effect*, yang berarti bagi daerah belakang, dampak positif lebih banyak.

Boudeville (dalam Muta'ali, 1997), menyatakan bahwa setiap wilayah mempunyai perbedaan struktur ekonomi, maka Boudeville mengusulkan perlu dilakukan pemilihan lokasi pusat atau kutub pertumbuhan yang dapat mendorong efek kumulatif kegiatan ekonomi dan menyebarkannya ke daerah belakangnya.

Friedmann (1979) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses integrasi sosial dan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya berbagai inovasi pada daerah inti (*core area*) yang kemudian menyebar pada daerah belakangnya (*periphery*). Pertumbuhan tersebut terjadi secara kumulatif dalam lingkup sosial dari kota-kota atau wilayah-wilayah, dimana terdapat berbagai kemudahan dalam sistem komunikasi dan informasi, kemampuan memecahkan suatu masalah sosial, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan konsep pusat atau kutub pertumbuhan wilayah, maka suatu area (wilayah) akan menjadi pusat pertumbuhan jika memenuhi persyaratan antara lain keuntungan lokasi (*location advantages*), ketersediaan sumberdaya, dan adanya kegiatan atau industri pendorong (*propulsive industry*). Konsep tersebut dalam penelitian ini diterjemahkan kedalam perumusan indikator-indikator desa pusat pertumbuhan, yaitu aksesibilitas lokasi dan pusat pelayanan, yang merupakan operasionalisasi konsep *location advantages*. Sedangkan aspek sumberdaya dan *propulsive industry*, dioperasionalisasikan dengan penentuan sektor basis pengembangan.

Kerangka Pemikiran

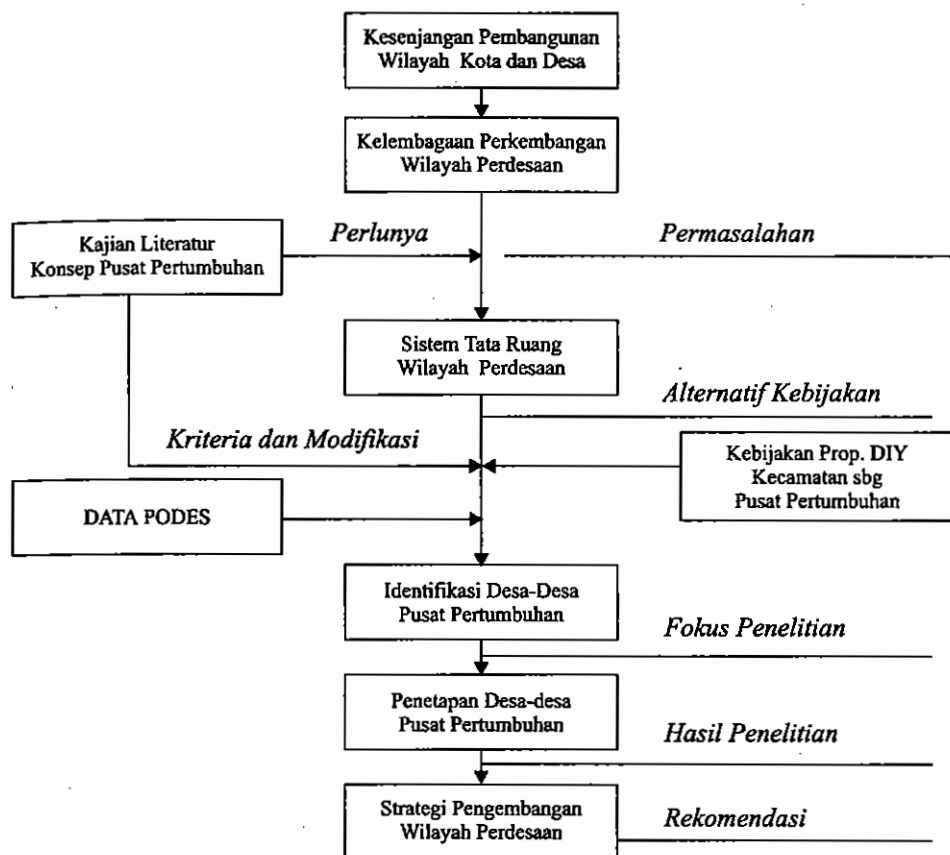
Salah satu permasalahan pembangunan adalah adanya ketimpangan hasil pembangunan antara daerah perdesaan dan perkotaan, yang mengakibatkan wilayah perdesaan sulit berkembang (Mubyarto, 1991). Untuk mengatasi problem tersebut sekaligus memberdayakan daerah perdesaan, muncul pelbagai kebijakan, seperti program pembangunan desa terpadu, program Inpres Desa tertinggal (IDT), pola usaha kemitraan, dan lain-lain. Kebijakan tersebut lebih bersifat sektoral dan *top-down* serta belum berbingkai spasial (ruang), sehingga terkesan mengabaikan perbedaan variasi wilayah.

Oleh karena itu diperlukan sistem pengembangan desa berbasis keruangan (Anonim, 1983), yaitu upaya mengintegrasikan berbagai program sektoral kedalam kerangka pikir tata ruang wilayah perdesaan, baik secara fungsional maupun secara teritorial, yaitu dengan pendekatan strategi pusat pertumbuhan pada daerah perdesaan (Bastemeijer, 1987). Selain mengurangi ketimpangan wilayah desa, pendekatan diharapkan dapat mendorong akselerasi atau percepatan pembangunan di pedesaan

Desa pusat pedesaan dapat diidentifikasi sebagai desa yang memiliki potensi penduduk, aksesibilitas, infrastruktur yang lengkap, letak yang strategis, dan didukung oleh basis ekonomi "ekspor" yang menonjol. Untuk mewujudkan desa pusat pertumbuhan diperlukan pembentukan tata ruang wilayah yang efisien dan efektif. Adapun pendekatan untuk membentuk tata ruang wilayah tersebut adalah (1) penentuan pusat-pusat pengembangan (Fisher dan Shyamadas, 1983) dan (2) perwilayahan kegiatan usaha, yaitu dengan menilai struktur produksi wilayah pedesaan, sebagai basis pengembangan perekonomian pedesaan. Dengan menggabungkan dua pendekatan tersebut, dibentuk suatu struktur tata ruang wilayah untuk pengembangan desa pusat pertumbuhan, dengan prosedur dua langkah, yaitu identifikasi desa-desa pusat pertumbuhan dan penetapan desa pusat pertumbuhan (lihat diagram alir Gambar 1).

Dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tersebut di atas dapat dirumuskan hipotesis yaitu *terdapat hubungan yang erat antara aksesibilitas lokasi desa, hirarki permukiman, dengan basis pengembangan*. Dengan kata lain semakin baik aksesibilitas suatu wilayah, semakin tinggi hirarki pelayanan, serta semakin besar sektor basis pengembangan.

¹ beberapa kriteria, antara lain jumlah penduduk, tingkat keterpusatan (sentralitas), tingkat kemudahan (aksesibilitas), kelengkapan fasilitas ekonomi dan sosial.



Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian Pengembangan Desa-Desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi DIY

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian dan Unit Analisis

Ruang lingkup wilayah penelitian adalah daerah administratif Kabupaten, di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di luar Kota Yogyakarta. Unit analisis dalam studi ini adalah desa, yaitu sebanyak 393 desa yang tersebar diempat Kabupaten yaitu Bantul, Sleman, Kulonprogo, dan Gunungkidul.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kuantitatif yang berbasis kepada analisis data sekunder. Basis data yang digunakan adalah data PODES tahun 2000. Disamping data tersebut beberapa data juga melengkapinya, antara lain Monografi Desa, Kabupaten Dalam Angka, Propinsi Dalam Angka, serta data dan publikasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam studi ini digunakan metode kuantitatif seperti Analisis Hirarki Pelayanan dengan menggunakan teknik Skalogram dan Indeks Sentralitas (Rondinelli, 1985). Untuk mengidentifikasi basis ekonomi digunakan analisis *Location Quotient (LQ)* (Bendavid, 1983). Masing-masing metode digunakan berdasarkan tujuan dan tahapan penelitian sebagaimana uraian berikut :

1. Dasar penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), berdasarkan tinjauan pustaka adalah desa-desa yang memiliki tiga prasarat, yaitu memiliki lokasi strategis (aksesibilitas lokasi), hirarki pelayanan tinggi, dan didukung oleh basis pengembangan ekonomi yang bervariasi. Penelitian ini mengembangkan asumsi satu kecamatan satu DPP utama dan didukung oleh satu DPP alternatif. DPP alternatif dikhususkan bagi kecamatan yang luas atau memiliki jumlah desa lebih dari tiga.
2. Variabel Penelitian dan Teknik Analisis, dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu aksesibilitas lokasi, hirarki pelayanan dan sektor basis pengembangan.
 - a. *Aksesibilitas Lokasi*, menunjukkan tingkat strategis dari suatu lokasi, yang ditunjukkan dengan unsur jarak dan transportasi. Variabel dan teknik analisis yang digunakan adalah :

Tabel 1. Variabel variabel pada Analisis Aksesibilitas Lokasi

Kelompok	Variabel dan teknik analisis (skoring)
Jarak	1. Jarak terhadap Ibukota (pusat) Kecamatan (Km) 2. Jarak terhadap Ibukota (pusat) Kabupaten (Km)
	Baik (skor = 3), jika , rata-rata + standar deviasi Sedang (skor = 2), jika rata-rata + standar deviasi Rendah (skor = 1), jika > rata-rata + standar deviasi
Transportasi	1. Jalan desa dapat dilalui kendaraan roda 4 2. Jalan desa beraspal (sebagian besar) 3. Jalan desa dilalui oleh kendaraan / angkutan umum
	Baik (skor = 3), jika tiga syarat dipenuhi Sedang (skor = 2), jika dua syarat dipenuhi Kurang (skor = 1), jika satu syarat atau tidak ada
Aksesibilitas Lokasi	Penjumlahan skor untuk aspek jarak dan transportasi, semakin tinggi skor semakin potensial menjadi desa pusat pertumbuhan

- b. *Analisis Hirarki Pelayanan*, digunakan untuk melihat tingkatan pelayanan masing-masing desa, dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

² Dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan secara langsung sebagai masukan bagi pengembangan program PEMDA Propinsi DIY tentang Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan

Tabel 2. Variabel variabel pada Analisis Hirarki Pelayanan

Kelompok	Variabel dan Teknik Analisis
Fasilitas Sosial	TK, SD, SLTP, SLTA, PT, Kursus, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Dokter, Balai Pengobatan, Apotik, Toko Obat, Dokter, Paramedis, Bidan
Fasilitas Ekonomi	Toko, Pasar Permanen, Swalayan, Pasar Hewan, Toko Elektronik, Saprotan, Sentra Industri, SPBU, Restoran, Penyewaan Alat Pesta, Bengkel, Reparasi, Hotel, Tempat Rekreasi, Bank, BPR, Pegadaian, KUD, Keuangan, Telepon Umum, Kantor Pos, Terminal, Wartel
Satuan	Jumlah Fasilitas, Perentase Fasilitas
Teknik Analisis	Skala Gutman, Skalogram, dan Analisis Sentralitas
Hasil	Semakin tinggi hirarki suatu desa, semakin potensial untuk menjadi desa pusat pertumbuhan

c. Analisis Sektor Basis Pengembangan

Data atau variabel yang digunakan adalah struktur pekerjaan atau tenaga kerja (TK) menurut sembilan sektor usaha Sektor basis pengembangan ditentukan dengan teknik LQ (*Location Quotient*).

$$LQ = (TK_{si} / TK_{ss}) / (TK_{sk} / TK_{ssk})$$

TK_{si} : Jumlah TK kegiatan ekonomi suatu sektor tertentu di desa

TK_{ss} : Jumlah TK kegiatan ekonomi seluruh sektor tertentu di desa

TK_{sk} : Jumlah TK kegiatan ekonomi suatu sektor tertentu di kabupaten

TK_{ssk} : Jumlah TK kegiatan ekonomi seluruh sektor tertentu di kabupaten

Jika $LQ > 1$, disebut sektor basis pengembangan, sebaliknya jika $LQ < 1$, disebut sektor non-basis pengembangan. Semakin banyak kegiatan basis, tingkat diversifikasi produksi semakin tinggi, semakin tinggi potensi untuk menjadi desa pusat pertumbuhan.

d. Analisis Korelasi Tata Jenjang Spearman, digunakan untuk membuktikan hipotesis hubungan antara aksesibilitas lokasi, hirarki pelayanan, dan sektor basis pengembangan (Sugiyono, 1997).

$$\text{Korelasi Spearman (rs)} = 1 - ((6 \sum di^2) / N^3 - N)$$

Keterangan: $\sum di^2$ = jumlah kuadrat selisih antara dua peringkat ranking dari masing-masing objek;

N = jumlah objek penelitian

³ yaitu sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalan, Industri, Listrik, Gas, dan Air Minum, Konstruksi, Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Bank dan Lembaga Keuangan, Jasa-jasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Penentu Desa Pusat Pertumbuhan

Potensi Aksesibilitas Lokasi

Berdasarkan analisis potensi aksesibilitas lokasi, secara keseluruhan desa-desa yang memiliki aksesibilitas rendah hanya 11 desa atau 2,8 persen, sebagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Gunungkidul dan KulonProgo. Selebihnya, 228 desa tergolong sedang dan 154 desa memiliki aksesibilitas lokasi baik (tabel 3).

Tabel 3. Aksesibilitas Lokasi Desa-Desa di Propinsi DIY

Nilai Skor aksesibilitas	Klasifikasi	Kulon Progo		Bantul		Gunungkidul		Sleman		Prop DIY	
		Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Skor < 2	Rendah	3	3.41	1	1.33	7	4.86	0	0.00	11	2.806
Skor 3-4	Sedang	51	57.95	48	64.00	78	54.17	51	59.30	228	58.16
Skor > 4	Tinggi	34	38.64	26	34.67	59	40.97	35	40.70	154	39.29
		88	100	75	100	144	100	86	100	393	100

Sumber : Hasil analisis data

Komposisi nilai skor aksesibilitas di empat kabupaten menunjukkan hal yang sama, yaitu sebagian besar berklasifikasi sedang dengan skor 3-4. Namun demikian dari empat kabupaten yang ada, desa-desa di kabupaten Sleman tergolong baik, karena tidak ada satupun desa yang tergolong rendah, diikuti Kabupaten Bantul.

Indeks Sentralitas dan Hirarki Pelayanan

Berdasarkan variabel demografis dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi, dilakukan penilaian terhadap indeks sentralitas dan hirarki pelayanan. Hasil perhitungan indeks sentralitas desa-desa di Propinsi DIY menunjukkan bahwa dua desa yang memiliki indeks sentralitas tertinggi (>100), yaitu Desa Caturtunggal dan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Desa tersebut memiliki radius pengaruh pada tingkat propinsi. Selanjutnya desa-desa yang menjadi ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan di Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul, umumnya berada pada kelompok klasifikasi antara 50-100 (tabel 4).

Tabel 4. Nilai Indeks Sentralitas Desa-Desa di Propinsi DIY (pembanding Propinsi)

Nilai Indeks Sentralitas	Klasifikasi	Kulon Progo		Bantul		Gunung kidul		Sleman		Prop DIY	
		Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
<2,5	Sangat rendah	39	44.32	8	10.67	59	40.97	5	5.81	111	28.32
2,5-5	Rendah	19	21.59	13	17.33	35	24.31	17	19.77	84	21.43
5,1-50	Sedang	16	18.18	22	29.33	29	20.14	25	29.07	92	23.47
50,1-100	Tinggi	14	15.91	32	42.67	21	14.58	37	43.02	104	26.53
>100	Sangat Tinggi	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	2.33	2	0.51
Jumlah		88	100	75	100	144	100	86	100	393	100

Sumber : Hasil analisis data (32 fasilitas desa)

Secara keseluruhan dari 393 desa-desa di Propinsi DIY, 195 desa atau 50% memiliki indeks sentralitas yang rendah dan sangat rendah, 23% sedang (tabel 4). Semakin tinggi indeks sentralitas, menunjukkan terdapat konsentrasi penduduk dan fasilitas sosial ekonomi, yang secara otomatis akan berdampak kepada konsentrasi aliran masuk barang dan jasa. Oleh karena itu berpotensi besar dikembangkan menjadi desa pusat pertumbuhan. Dengan demikian terdapat 106 desa atau 27,04% desa-desa di Propinsi DIY yang memiliki indeks sentralitas tinggi dan sangat tinggi, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa pusat pertumbuhan. Di Kabupaten Kulonprogo sebanyak 14 desa, Bantul 32 desa, Sleman 37 desa, dan Gunungkidul hanya 21 desa.

Berdasarkan nilai indeks sentralitas tersebut di atas dan acuan klasifikasi ESCAP (Anonim, 1983) penelitian ini menetapkan empat tingkatan atau hirarki pelayanan, yaitu

- Hirarki I (Pusat Regional), memiliki radius pelayanan tingkat kabupaten, atau yang meliputi seluruh hirarki di bawahnya. Selain itu memiliki peubah fungsi pelayanan kurang lebih dari 70% dengan indeks sentralitas tertinggi (>100).
- Hirarki II (Pusat Distrik), adalah pusat pelayanan yang memiliki distribusi fungsi sebesar 50-70% dengan indeks sentralitas antara 50-100. Desa ini memiliki radius pelayanan lintas kecamatan.
- Hirarki III (Sub Distrik), adalah pusat pelayanan yang memiliki distribusi fungsi sebesar 35-50% dengan indeks sentralitas antara 25-50. Desa ini memiliki radius pelayanan satu lingkup kecamatan.
- Hirarki IV (Pusat Lokal), adalah pusat permukiman yang memiliki distribusi fungsi pelayanan kurang dari 30% dengan indeks sentralitas <25. Dan radius pelayanan hanya pada tingkat desa. Selengkapanya jumlah desa untuk masing-masing hirarki disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. Hirarki Pusat pelayanan Desa-Desa di Propinsi DIY

Hirarki	Jangkauan Pengaruh	Kulon Progo		Bantul		Gunung kidul		Sleman		Prop DIY	
		Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
I	Kabupaten	1	1.14	1	1.33	2	1.39	2	2.33	6	1.531
II	Lintas kecamatan	7	7.95	11	14.67	5	3.47	10	11.63	33	8.418
II	Kecamatan	32	36.36	34	45.33	31	21.53	31	36.05	128	32.65
IV	Desa-Lokal	48	54.55	29	38.67	106	73.61	43	50.00	226	57.65
	Jumlah	88	100	75	100	144	100	86	100	393	100

Sumber : Hasil analisis data

Berdasarkan analisis hirarki pelayanan (tabel 5) ditunjukkan bahwa di Propinsi DIY terdapat 6 desa yang memiliki hirarki I, dengan jangkauan pelayanan tingkat kabupaten. Desa-desanya tersebut adalah desa Caturtunggal dan Condongcatur (Kabupaten Sleman), desa Bantul (Kabupaten Bantul), desa Wates (Kabupaten Kulonprogo), dan Wonosari dan Kepek (Kabupaten Gunungkidul). Secara umum (terkecuali Kabupaten Sleman), desa-desa tersebut adalah desa ibukota Kabupaten. Desa-desa tersebut dapat dipastikan sebagai desa terunggul 'leading area' bagi desa-desa lain dimasing-masing kabupaten, sekaligus sebagai desa pusat pertumbuhan. Berikutnya potensial untuk menjadi Desa Pusat Pertumbuhan adalah desa-desa pada hirarki II, sejumlah 33 desa.

Identifikasi Sektor Basis Pengembangan

Identifikasi sektor basis pengembangan di masing-masing desa didasarkan pada data struktur pekerjaan. Data tersebut dibandingkan dengan data yang sama pada tingkat Kabupaten dengan metode LQ (*Location Quotient*). Dalam kaitannya dengan penentuan desa pusat pertumbuhan, maka semakin banyak dan beragam sektor basis pengembangan, semakin potensial sebagai desa pusat pertumbuhan.

Berdasarkan hasil analisis LQ, dari 393 desa yang diteliti hanya 3 desa yang tidak memiliki sektor basis ($LQ < 1$), yaitu 2 desa di kabupaten Gunungkidul dan 1 desa di Kabupaten Kulonprogo. Desa yang paling potensial memiliki lebih dari 3 sektor basis pengembangan ($LQ > 1$), sejumlah 48 desa atau 12.24%, yang tersebar di 9 desa (Kabupaten Sleman dan Kulonprogo), 20 desa di kecamatan Bantul dan 10 desa di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar desa (61,99%) memiliki jumlah sektor basis antara 2-3 (tabel 6). Dari 9 sektor basis pengembangan di masing-masing desa tersebut, sektor yang menjadi basis di hampir semua desa adalah sektor pertanian, berikutnya adalah sektor jasa dan pertambangan. Sektor-sektor lain yang berkembang adalah sektor angkutan, perdagangan dan jasa, dan industri. Sedangkan sektor yang relatif kurang menjadi andalan desa-desa di Propinsi DIY adalah sektor listrik dan gas, keuangan.

* Pertimbangan : karena kelangkaan data struktur produksi dimasing-masing desa.

Tabel 6. Jumlah Sektor Basis Pengembangan Desa-Desa di Propinsi DIY

Jumlah Sektor Basis	Klasifikasi	Kulon Progo		Bantul		Gunung kidul		Sleman		Prop DIY	
		Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%	Desa	%
Tidak punya	Sangat rendah	1	1.14	0	0.00	2	1.39	0	0.00	3	0.765
1 Sektor basis	Rendah	32	36.36	14	18.67	33	22.92	18	20.93	97	24.74
2-3 Sektor Basis	Sedang	46	52.27	41	54.67	99	68.75	59	68.60	243	61.99
>3 Sektor Basis	Sangat Tinggi	9	10.23	20	26.67	10	6.94	9	10.47	48	12.24
Jumlah		88	100	75	100	144	100	86	100	393	100

Sumber : Hasil analisis data

Tinjauan sektor basis pengembangan antar kabupaten menunjukkan bahwa selain sektor pertanian, desa-desa di Kabupaten Kulonprogo mengandalkan sektor pertambangan dan jasa sebagai sektor basis, Kabupaten Bantul berpijak pada sektor angkutan, jasa, perdagangan, dan industri. Sektor industri, khususnya industri kecil dan rumah tangga berkembang potensial di Kabupaten Gunungkidul, selain pertambangan dan jasa. Sedangkan di pedesaan kabupaten Sleman, lebih pada sektor perdagangan dan jasa.

Pola Hubungan Antara Aksesibilitas Lokasi, Hirarki Permukiman dan Sektor Basis Pengembangan

Berdasarkan hasil korelasi (tabel 7) dan uji analisis korelasi tata jentang *spearman*, dengan batas nilai kritis r_s koefisien korelasi tata jentang Spearman, untuk $n = 393$, pada taraf signifikansi (0,01) adalah 0,6987, dan taraf signifikansi (0,05) adalah 0,506, diperoleh bahwa nilai hasil perhitungan lebih besar dari batas nilai kritis. Dengan demikian hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti terdapat hubungan yang erat antara aksesibilitas lokasi, hirarki permukiman dan sektor basis pengembangan. Dengan kata lain desa-desa yang memiliki hirarki pelayanan tinggi, umumnya terletak pada lokasi dan aksesibilitas yang strategis, sekaligus didukung oleh jumlah sektor basis pengembangan yang cukup banyak dan bervariasi.

Tabel 7. Matrik Korelasi Spearman (r_s) antara Hirarki Pelayanan, Aksesibilitas Lokasi, dan Basis Pengembangan

	HP	AL	BP
HP (Hirarki Pelayanan)	1.0000	0.7684 (0.01)	0.7932 (0.01)
AL(Aksesibilitas Lokasi)	0.7684 (0.01)	1.0000	0.5963 (0.05)
BP(Basis Pengembangan)	0.7932	0.5963	1.0000

Sumber : Hasil analisis dengan menggunakan korelasi tata jentang Spearman. Jumlah populasi (n) = 393

Desa Pusat Pertumbuhan Terpilih

Berdasarkan kriteria aksesibilitas lokasi, hirarki pelayanan, dan basis pengembangan ekonomi, penelitian ini menetapkan 59 Desa Pusat Pertumbuhan Utama (DPP-U) dan 54 Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif (DPP-A). Penetapan ini didasarkan asumsi satu kecamatan satu DPP-U dan didukung oleh satu DPP-A. DPP alternatif dikhususkan bagi kecamatan yang cukup luas atau memiliki jumlah desa lebih dari tiga. DPP terpilih menurut Kabupaten di sajikan pada tabel 8.

Desa-desanya yang terpilih menjadi DPP-U sebagian besar (80%) merupakan desa yang menjadi ibu kota kecamatan dan berada pada hirarki kedua dan ketiga. Selain itu ada tiga desa yang memiliki karakter tertinggi yaitu desa Wates, Bantul, dan Wonosari yang merupakan ibu kota Kabupaten. Khusus di Kabupaten Sleman DPP-U selain sebagai ibu kota kecamatan, juga karena letaknya di pinggiran kota Yogyakarta, yaitu desa Condongcatur dan Caturtunggal, yang memiliki infrastruktur terlengkap. Umumnya desa-desa tersebut memiliki sektor basis pengembangan 3 macam atau lebih, bahkan untuk desa yang menjadi Ibukota Kabupaten dan Hirarki I dapat memiliki 5 jenis sektor basis pengembangan. Secara spasial, distribusi lokasi DPP-U dan DPP-A ditampilkan pada Gambar 2. Dari gambar atau peta tersebut tampak bahwa sebagian besar letak DPP-U dan DPP-A berdekatan atau bahkan berimpit. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan selama ini relatif terkonsentrasi di seputar pusat pertumbuhan.

Karakteristik lain terpilihnya DPP antara lain di Kabupaten Kulonprogo, sesuai dengan sistem hirarki tata ruang wilayah, yaitu adanya 6 titik pertumbuhan utama, yaitu desa Glagah dan Brosot sebagai pusat pengembangan Kulonprogo bagian selatan. Desa Sentolo dan Wates pada poros Tengah dan dibagian utara sebagai titik pertumbuhannya terletak di desa Hargorejo dan Kembang. Dalam kaitan dengan tata ruang wilayah di Kabupaten Bantul, terdapat 5 titik utama yang membentuk huruf "T", yaitu desa Parangtritis dibagian selatan sebagai pusat pariwisata dan poros jalur selatan, Bantul sebagai pusat pemerintahan dan jasa dibagian tengah, Srimulyo dibagian timur, Panggungharjo dipinggiran kota Yogyakarta, dan Argomulyo dititik Barat. Pengembangan 5 titik utama desa pertumbuhan tersebut diharapkan dapat merangsang pertumbuhan kabupaten bantul lebih cepat, khususnya dalam menampung luapan perkembangan kota Yogyakarta.

⁵ Dengan pertimbangan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan secara langsung sebagai masukan bagi pengembangan program PEMDA Propinsi DIY tentang Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan

Tabel 8. Desa Pusat Pertumbuhan Utama dan Alternatif Terpilih di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul, dan Sleman, Propinsi DIY

KABUPATEN KULONPROGO			KABUPATEN GUNUNGKIDUL		
Kecamatan	DPP-U	DPP-A	Kecamatan	DPP-U	DPP-A
Temon	Glagah	Temon Kulon	Panggang	Girijati	Giriharjo
Wates	Wates	Bendungan	Paliyan	Krmg Duwet	Jetis
Panjatan	Depok	Panjatan	Tepus	Sidoharjo	Purwodadi
Galur	Brosot	Kranggan	Rongkop	Semugih	Karangwuni
Lendah	Bumirejo	Jatirejo	Semanu	Semanu	Pacarejo
Sentolo	Sentolo	Salamrejo	Ponjong	Ponjong	Genjahan
Pengasih	Pengasih	Margosari	Karangmojo	Gedang Rejo	Bejiharjo
Kokap	Hargorejo	Hargomulo	Wonosari	Wonosari	Kepek
Nanggulan	Kembang	Jati Saron	Playen	Logandeng	Ngawu
Girimulyo	Giripurwo	Jatimulyo	Patuk	Ngoro Oro	Patuk
Samigahuh	Gerbosari	Pagerharjo	Nglipar	Nglipar	Natah
Kalibawang	Banjaroyo	Banjararum	Ngawen	Kampung	Jurang Jero
			Semin	Semin	Bulurejo
Srandakan	Trimurti		Moyudan	Sumber Agung	Sumberrahayu
Sanden	Srigading	Murtigading	Minggir	Sendang Mulyo	Sendangagung
Kretak	Parangtritis	Donotirto	Sayegan	Margoagung	Margodadi
Pundong	Srihardono		Godean	Sidoagung	Sidoarum
Bambaglipuro	Sumbermulyo		Gamping	Ambarketawang	Banyuraden
Pandak	Wijirejo	Gilangharjo	Mlati	Sinduadi	Sendangadi
Bantul	Bantul	Trirenggo	Depok	Condong Catur	
Jetis	Patalan	SumberAg-ung	Berbah	Tegal Tirto	Kali Tirto
Imogiri	Karangtalun	Imogiri	Prambanan	Madu Rejo	Boko Harjo
Dlingo	Dlingo	Jatimulyo	Kalasan	Tirto Martani	Purwo Martani
Pleret	Wonokromo	Pleret	Ngemplak	Widodo Martani	Wedomartani
Piyungan	Srimulyo	Srimulyo	Ngaglik	Sari Harjo	Sinduharjo
Banguntapan	Banguntapan	Baturetno	Sleman	Tridadi	Triharjo
Sewon	Panggugharjo	Bangunharjo	Tempel	Lumbung Rejo	Pondok Rejo
Kasih	Ngestiharjo	Tirtonirmolo	Turi	Donokerto	Bangun Kerto
Pajangan	Sendangsari		Pakem	PakemBina-ngun	HargoBinangun
Sedayu	Argomulyo	Argosari	Cangkringan	Argo Mulyo	Wukir Sari

Sumber : Hasil Analisis

Desa Pusat Pertumbuhan Kabupaten Sleman, dalam kaitan dengan tata ruang wilayah dijumpai pula 5 titik pertumbuhan utama, yaitu desa Pakembinangun dibagian utara sebagai pusat pariwisata Kaliurang dan poros jalur Yogya-Kaliurang yang berkembang cepat, Tridadi sebagai pusat pemerintahan dan jasa dibagian tengah, serta titik-titik dipinggiran kota yang membentang antara Kalasan, Depok dan Gamping, dengan titik DPP Tirtomartani, Condongcatur, Ambarketawang. Disamping itu terdapat pula titik perkembangan yaitu titik perbatasan DIY Jateng di desa Lumbung Rejo, Barat tengah di sayegan dan Timur tengah di Wedomartani. Pengembangan terhadap titik-titik pertumbuhan tersebut diharapkan dapat merangsang pertumbuhan kabupaten Sleman lebih cepat, khususnya dalam mengantisipasi perkembangan kota Yogyakarta yang lebih cenderung bergerak ke utara (Kabupaten Sleman). Sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul persebaran relatif merata dengan titik berat pada lima DPP-U yaitu Wonosari, dibagian tengah atau pusat, dan didukung empat pengembangan lainnya, yaitu Playen, Karangmojo, Semin, dan Semanu, yang tersebar di bagian barat, utara, timur dan selatan. Pengembangan titik-titik DPP tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan Kabupaten Gunungkidul yang selama ini relatif tertinggal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Konsepsi Desa Pusat Pertumbuhan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditentukan berdasarkan kriteria aksesibilitas lokasi, hirarki pelayanan, dan sektor basis pengembangan. Semakin strategis suatu lokasi, semakin tinggi hirarki pelayanan, dan dukungan sektor basis pengembangan yang bervariasi, maka semakin potensial untuk menjadi desa pusat pertumbuhan.
2. Terdapat hubungan erat antar tiga kriteria penentu desa pusat pertumbuhan, yaitu semakin baik aksesibilitas lokasi, semakin baik hirarki pelayanan, dan basis pengembangannya lebih banyak dan bervariasi. Hal ini memperkuat kedudukan tiga kriteria tersebut dalam proses penentuan desa pusat pertumbuhan.
3. Penelitian ini menetapkan 59 Desa Pusat Pertumbuhan Utama (DPP-U) dan 54 Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif (DPP-A). Penetapan ini didasarkan asumsi satu kecamatan satu DPP-U dan didukung oleh satu DPP-A. Desa-desanya yang terpilih menjadi DPP sebagian besar merupakan desa yang menjadi ibu kota kecamatan dan berada pada hirarki kedua dan ketiga, memiliki aksesibilitas lokasi yang strategis, dan memiliki basis pengembangan lebih dari 2 sektor. Secara spasial, letak DPP-U dan DPP-A berdekatan bahkan berimpit.
4. Desa Pusat Pertumbuhan terpilih secara umum terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten masing-masing, dimana sebagian besar DPP-U terpilih umumnya juga telah ditetapkan sebagai pusat-pusat perkembangan atau pusat SWP (Sub Wilayah Pembangunan).

5. Hasil-hasil pembangunan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat wilayah. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan hirarki pelayanan antar desa dan banyaknya basis pengembangan pada wilayah-wilayah dengan hirarki tinggi, yang berfungsi sebagai Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan. Desa-desa lain diluar dua karakter tersebut relatif kurang berkembang. Untuk menghindari terkonsentrasinya pembangunan di pusat-pusat tersebut maka penelitian ini juga menetapkan DPP-A.

Saran

1. Dalam konteks Program Pengembangan Kecamatan sebagai pusat pertumbuhan yang dilakukan PEMDA Propinsi DIY, penetapan beberapa desa sebagai pusat pertumbuhan dapat menjadi masukan penting dan diterapkan, mengingat hingga saat ini baru beberapa Kecamatan yang ditetapkan sebagai program percontohan.
2. Perlunya penekanan redistribusi pelaksanaan pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah. Oleh karena itu, selain terpilihnya Desa Pusat Pertumbuhan Utama (DPP-U), penelitian menyarankan beberapa desa ditetapkan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan Alternatif (DPP-A). Jika lokasi DPP-U dan DPP-A berdekatan atau berimpit, untuk tujuan pemerataan pembangunan, maka disarankan untuk lebih mengembangkan DPP-A.
3. Perlunya pembentukan tata ruang perwilayahan yang mempunyai hirarki sistematis dan fungsional, dari hirarki tertinggi sampai terendah dengan menciptakan keterkaitan fisik maupun sosial ekonomi, baik *interregional* maupun *intraregional*. Selain itu perlu penekanan terhadap pengembangan ekonomi lokal, melalui diversifikasi sektor basis.
4. Perlu diteliti lebih lanjut tentang pola hubungan sebab akibat yang lebih rinci, khususnya antara aksesibilitas lokasi, hirarki pelayanan, dan sektor basis pengembangan, sehingga dapat diimplementasikan secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1977. *Dasar-Dasar Penyusunan Tata Desa*, Dirjen Pembangunan Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Anonim, 1979. *Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*.
- Anonim, 1983. *Guidelines for Rural Center Planning*, Economic and Social Commission for Asia and The Pasific, United Nation, New York.
- Anonim, 1992. *Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY*. Pemerintah Daerah Propinsi DIY.
- Bastemeijer, T. 1987. *An Approach to Rural Center Planning in the Framework of Integrated Regional Development*, Departement of Civil Engineering, University of Technology, Delf, The Netherlands.
- Bendavid, Avrom. 1983. *Regional and Local Economic Analysis for Practioners*, New and Expanded Edition. Prager Publisher, New York.
- Bintarto, 1984. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Jayadinata, T, Johara. 1997. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Penerbit ITB, Bandung.
- Fisher, H. B., dan Shyamadas, 1983. *Hierarchical Location Analysis for Integrated Area Planning : Experience of the pilot Research Project in Growth Centers, India*, Paper presented in the 1983 Regional Science Congress in Vienna.
- Friedman, John and Clyde Weaver, 1979. *Territory and Fuction, the Evolution of Regional Planning*. Edward Arnold Publisher Ltd.
- Hanafiah, T., 1987. *Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Perdesaan*, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, Bogor.
- Hirschman, Albert, O., 1958. *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press.
- Kuznets, Simon, 1971. *Economic Growth and Nation*, Harvard University Press.
- Misra, R.P., 1975. *Growth Poles and Growth Centers in the Context of India's Urban and Regional Development Problems*, In Anthony Kuklinski (ed.), *Growth Poles and Growth Centers In regional Planning*, Vol. 5, Mouton, Paris, The Hague.
- Mubyarto, 1991. *Strategi Pembangunan Perdesaan*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muta'ali, Luthfi, 1997. *Kajian Terhadap Alternatif Strategi Pengembangan Wilayah HandOut Pelengkap Mata Kuliah Ilmu Wilayah*, Fakultas Geografi UGM.
- Muta'ali, Luthfi, 2000. *Pendekatan Integrasi Spasial Dalam Pembangunan Wilayah*, Fakultas Geografi UGM.
- Rondinelli, A Dennis, 1985. *Applied Methods of regional Analysis : The Spatial Dimensions of Development Policy*, A Westview Special Study.
- Sugiyono, 1997. *Statistika untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Sumitro, Djojohadikusumo, 1994. *Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Taylor, D.R.F., 1981. *Roles and Function of Lower Order Centers in Rural Development*, In Fu Chen Lo (ed.), *Rural-Urban Relations and Regional Development*. Maruzen Asia, Nagoya, Japan.
- Todaro, M. 1997. *Economic Development in The Third World*. Addison-Wesley Publishing Company.